

▶ IMPLEMENTASI OSS

# Intinya, Jangan Bikin Bingung Pengusaha

Ipak Ayu H.N & Dewi A. Zuhriyah  
redaksi@bisnis.com

Senin pagi, (9/7) sejumlah menteri, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso terlihat menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kehadiran pejabat negara ini bukan untuk agenda rutin rapat koordinasi yang biasanya digelar di Kantor yang terletak di sisi timur Lapangan Banteng, Jakarta Pusat tersebut.

Agenda pagi itu cukup spesial yakni perlis sistem izin terintegrasi berbasis daring atau Online Single Submission (OSS). Cukup banyak poin yang bisa dijabarkan ketika seremoni ini digelar menjadi cukup spesial.

Pasalnya, OSS sudah melalui drama yang cukup rumit dan menyisakan sejumlah tanda tanya dalam keberlangsungannya ke depan.

*Pertama*, ketidakhadiran Presiden Joko Widodo yang awalnya digadang akan meluncurkan OSS di Kantor BKPM. *Kedua*, implementasi kegiatan teknis investasi di Kantor Kemenko Perekonomian. *Ketiga*, pro-kontra yang membayangi OSS hingga akhirnya nekat untuk dirilis.

Dari tiga kesimpulan di atas, memang ada indikasi banyak hal yang masih harus dibenahi dalam berjalannya sistem yang akan merombak ulang tatanan izin konvensional maupun PTSP yang sudah berjalan selama ini.

Thomas T. Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang seharusnya menjadi lembaga paling bertanggungjawab pada OSS harus 'meminta tolong' karena ketidakmampuan mengemban amanah baru ini.

Thomas selalu bungkam ketika ditanyai terkait OSS, bahkan sampai dalam kegiatan peluncuran sistem ini. Dalam sambutan pembukaan seremoni peluncuran OSS, dia hanya mengemukakan OSS adalah sebuah tonggak baru yang signifikan.

"OSS adalah upaya komprehensif dalam menertibkan regulasi yang tidak sinkron. BKPM akan *all out* mendukung menko perekonomian dalam pengimplementasian OSS ini," katanya. Senin (9/7).

Thomas mengemukakan melalui PP 24/2018 pemerintah mewajibkan semua lembaga non kementerian

pemda untuk memproses semua izin melalui sistem OSS.

Pihaknya juga meminta bagi dunia usaha untuk melihat upaya OSS sebagai cermin, kesungguhan komitmen politik pemerintah untuk menertibkan, menyalurkan proses perizinan di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terlihat lega. Dia menegaskan kembali dalam enam bulan ke depan kegiatan OSS sepenuhnya akan diambil alih oleh BKPM sebagai lembaga teknis yang menaungi segala kegiatan investasi di Indonesia.

"OSS akan menjadikan perizinan lebih mudah, murah, dan cepat."

Darmin dan Tim Kemenko Perekonomian juga sempat melakukan simulasi pada seluruh menteri dan pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Secara umum sistem berjalan dengan sederhana dan tak banyak yang dibutuhkan dalam pengisian form. Sebab, reformasi izin OSS ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan NIB dan NPWP untuk kemudian mengantongi komitmen berusaha dan mulai menjalankan usaha sembari memenuhi setiap komitmen yang diminta.

Tak hanya itu, usai resmi merilis OSS pemerintah menargetkan pertumbuhan pendapatan investasi asing langsung di Indonesia sebesar 5% dari yang saat ini hanya 1%.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan angka itu berasal dari rerata *investment outflow* yang beredar dengan jumlah sekitar US\$15 miliar per tahun.

Lebih pahit, mayoritas investasi masuk ke Indonesia melalui negara lain seperti Singapura. OSS juga diharapkan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Pasalnya, selama tujuh tahun belakang investasi batal mencapai 68%.

"Dari angka itu 29% merupakan investasi dalam negeri yang tidak jadi karena rumit mengurus izin," katanya.

Adapun, Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN juga masih kecil atau dari target 39%-40% per tahun saat ini baru 32%. Artinya, investasi perorangan tidak terbuka.

Lebih jauh, nantinya investasi iklim usaha bisa mendorong perekonomian nasional yang akan melahirkan pertumbuhan ekspor,



Setkab/Humas Kemenko

Menko Perekonomian Darmin Nasution (*tengah*) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo (*kedua kiri*), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (*kiri*), Kepala BKPM Thomas Lembong (*kedua kanan*) dan Menkominfo Rudiantara meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS), di Jakarta, Senin (9/7).

perluasan wisata, dan industri.

Sampai peluncuran OSS kemarin, pemerintah sudah melaksanakan 8 kali bimbingan teknis pada seluruh Pemda dan dua kali langsung oleh Presiden.

Secara umum kesiapan daerah sudah baik, dari 542 kabupaten/kota hanya tinggal 76 yang belum menyelesaikan satuan tugasnya.

Pelaku usaha menyambut baik diresmikannya sistem perizinan terintegrasi elektronik atau OSS. Apindo dan Kadin akan mengirim tim untuk mempelajari prosesnya secara langsung.

## MOMENTUM BAIK

Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan peluncuran OSS ini merupakan momentum baik dengan berbagai kondisi yang sedang berlangsung.

Menurutnya, dalam implementasi OSS ini dunia usaha masih banyak dihantui keraguan. Sebab, berkaca dari yang sudah ada seperti penerapan PTSP masih banyak kendala yang belum terselesaikan.

Shinta mengemukakan dua kunci suksesnya OSS yakni meningkatkan ekspor dan menarik investasi. Untuk itu, langkah besar OSS harus

benar-benar berjalan dengan baik.

"Pokoknya sekarang yang saya sampaikan ke teman-teman kita jangan terlalu negatif. Kita terima saja, kita sambut baik."

Menurut Shinta, prinsipnya OSS tidak boleh mengganggu kelangsungan dunia usaha. Sebab, kalau izin membingungkan malah mengganggu, bukan membantu.

CEO PT Lookman Djaja, Kyatmaja Lookman juga berpendapat positif, karena OSS memudahkan para pemain baru untuk mengurus izin.

"Gak ada hubungannya dengan tarif angkut barang, tapi buat pemain baru jelas buat mereka lebih mudah mengurus izin," ujarnya kepada *Bisnis*.

Kyatmaja mengatakan adanya OSS juga bisa menghemat biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha. Pasalnya semakin lama waktu perizinan maka beban biaya pengusaha pun makin banyak seperti biaya sewa tempat, gaji pegawai hingga modal yang diendapkan.

Dia mencontohkan ketika perusahaannya mengajukan izin untuk membangun terminal multimoda di Cikarang. Izin yang sudah diajukan sejak 2014 belum juga jelas. "Urusan kami memang agak kompleks karena berkenaan dengan tata ruang."